

Setelah Tragedi Nikel di Pulau Obi

Berita Tempo Plus

Setelah Tragedi Nikel di Pulau Obi

[Michael Buehler](#)

Associate Professor di bidang Politik Perbandingan di SOAS, University of London. Pada 2016, ia menerbitkan buku *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia* melalui Cambridge University Press

Perusahaan dan investor harus bertanggung jawab dalam pencemaran kromium heksavalen akibat tambang nikel di Pulau Obi.

20 Juni 2025 | 06.00 WIB



Perbesar

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko

Iklan



Ringkasan Berita

- Kebocoran kromium heksavalen yang bisa memicu kanker di Pulau Obi adalah masalah rantai pasokan global.
- Glencore Internasional sebagai salah satu pemilik saham utama Harita perlu ikut dimintai pertanggungjawaban.
- Di Indonesia, problem akuntabilitas perusahaan bukan pada kurangnya aturan formal, melainkan pada kurangnya keterbukaan vertikal.

B ULAN lalu, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang bekerja sama dengan The Gecko Project, mengungkap t [tragedi menyedihkan dan ironi sumber energi terbarukan yang merusak lingkungan](#). Hasil , yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik, acap diklaim sebagai energi terbarukan karena menghindarkan pemakaian energi merusak yang bersumber dari minyak bumi, gas, atau batu bara.

Ironisnya, selama lebih dari satu dekade operasi , anak usaha , mencemari sungai dan air minum di sekitar konsesi pertambangan nikel mereka di , Maluku Utara. [Dokumen internal perusahaan](#) menunjukkan bahwa manajemen tahu kadar kromium heksavalen dari operasi nikel mereka bocor ke lingkungan sejak 2012. Meski demikian, perusahaan tak menghentikan pencemaran atau mengungkapkannya kepada masyarakat.

Kebocoran kromium heksavalen yang bisa memicu kanker itu bukan hanya tragedi lokal. Ini adalah masalah rantai pasokan global. Pada 2023, perusahaan ini [melantai di Bursa Efek Indonesia](#) dan mengumpulkan dana publik sebesar US\$ 650 juta atau sekitar Rp 9,7 triliun dalam kurs saat itu. Salah satu investor asing utamanya adalah [Glencore International](#), raksasa komoditas asal Swiss.

Baca Juga:

- [Pulau Obi, Simbol Kegagalan Transisi Energi](#)

Investasi tersebut merupakan kelanjutan hubungan kedua perusahaan sebelumnya secara lebih mendalam. Pada 2019 dan 2020, mengakuisisi saham minoritas yang substansial—sekarang sekitar 32 persen— [di divisi pertambangan bauksit dan alumina milik Harita](#), PT Cita Mineral Investindo, yang memperkuat kemitraan jangka panjang mereka.

BACA JUGA

[Harita Bukukan Pendapatan Rp 14 Triliun di Semester I 2025, Komitmen terhadap Prinsip ESG](#)

Meskipun Glencore tidak mengoperasikan tambang secara langsung, kepemilikan saham mereka menjadikannya sebagai penerima manfaat operasi Harita dan, bisa dibilang, menjadi

pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas dampak lingkungannya. [Glencore juga telah menjadi pembeli utama produk nikel Harita](#). Data menunjukkan perdagangan kedua perusahaan itu mencapai ratusan juta dolar.

Keselarasannya jelas: Harita menyediakan akses ke bahan baku dari salah satu wilayah penghasil nikel terkaya di dunia, sementara Glencore menawarkan jangkauan pasar global, keahlian perdagangan, dan modal. Hubungan keduanya telah menerbitkan sorotan tentang uji tuntas produk dan tanggung jawab operasi perusahaan.

BACA JUGA

[Harita Nickel Jajaki Opsi Ekspor Nikel Sulfat ke Korea dan Jepang](#)

Pengungkapan seputar kesadaran Harita selama satu dekade tentang pencemaran air di Pulau Obi menghidupkan kembali diskusi tentang akuntabilitas perusahaan di Swiss. Public Eye, organisasi nonpemerintah yang didedikasikan untuk keadilan global, terdepan dalam mengadvokasi undang-undang akuntabilitas perusahaan yang lebih ketat.

Menanggapi berbagai skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Swiss yang melanggar hak asasi manusia dan standar lingkungan di luar negeri, Public Eye meluncurkan Konzernverantwortungsinitiative (Inisiatif Tanggung Jawab Perusahaan) untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan ini atas tindakan mereka secara global.

Meskipun inisiatif awal [ditolak dalam referendum pada 2020](#), momentum untuk mendorong akuntabilitas operasi dan rantai pasok komoditas perusahaan tidak memudar. Pada awal 2025, Public Eye memperkenalkan [Konzernverantwortungsinitiative](#) yang diperbarui. Proposal baru ini bertujuan untuk menyelaraskan Undang-Undang Swiss dengan Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD) Uni Eropa tahun 2024, yang mengamanatkan bahwa perusahaan besar menghormati hak asasi manusia dan standar lingkungan di seluruh rantai pasokan global mereka.

Inti dari inisiatif seperti Konzernverantwortungsinitiative Swiss dan CSDDD Uni Eropa adalah gagasan bahwa tekanan hukum pada perusahaan multinasional bisa meningkatkan perilaku di seluruh rantai pasokan global. Kerangka kerja ini mengharuskan perusahaan induk mengatasi risiko hak asasi manusia dan lingkungan tidak hanya dalam operasi mereka sendiri, tapi juga di seluruh anak perusahaan, pemasok, dan mitra.

Asumsi yang mendasari gagasan uji tuntas adalah [perusahaan transnasional yang besar bisa bertindak sebagai jangkar regulasi](#) —memanfaatkan pengaruh, sistem kepatuhan, dan reputasi —untuk mendisiplinkan manajemen perusahaan, terutama di negara-negara dengan pengawasan yang lemah.

Namun visi Konzernverantwortungsinitiative sangat teknokratis dan, dalam kasus seperti Harita, naif secara politik.

Harapan bahwa perusahaan seperti Glencore berfungsi sebagai regulator *de facto* bagi mitra rantai pasokannya mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas memaksakan perubahan yang berarti dan bahwa mitra lokalnya secara struktural responsif terhadap tekanan eksternal. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh polusi jangka panjang Harita di Pulau Obi, pemasok komoditas ini bukan sekadar agen ekonomi, tapi [mereka juga punya kuku pengaruh dalam ekonomi-politik domestik](#).

Baca Juga:

- [Fulus Bos Harita untuk Gubernur Maluku Utara](#)

Bisnis konglomerasi Harita difasilitasi oleh aliansi strategis dengan elite politik dan aparat keamanan. [Penangkapan Direktur Hubungan Eksternal Harita Stevi Thomas pada Desember 2023](#), karena diduga menyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dengan imbalan izin pertambangan, menunjukkan keterikatan mendalam perusahaan tersebut dengan kekuasaan politik. Selain itu, operasi Harita di Pulau Obi melekat pada aparat keamanan Indonesia, melalui [kerja sama dengan tentara dan polisi](#).

Wilayah pertambangan Harita secara resmi ditetapkan sebagai obyek vital nasional pada Mei 2019 dan ditegaskan kembali pada November 2020 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada awal 2020, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat melakukan latihan di Pulau Obi untuk "meningkatkan kewaspadaan" di zona obyek vital. Latihan TNI AD ini menandakan perlindungan militer dengan kedok keamanan nasional.

Pada Desember tahun itu, Gubernur Akademi Militer saat itu, Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, menerima sumbangan Rp 1 miliar dari Harita dalam sebuah acara yang dihadiri perwakilan Harita dan pejabat tinggi militer. Hubungan ini menandakan pembinaan aktif perusahaan terhadap militer Indonesia dalam hubungan pertahanan.

Pada April 2021, Harita menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk mengkoordinasikan keamanan di wilayah konsesinya. Kemudian pada Juni, Luhut Binsar Pandjaitan, saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, meresmikan smelter Harita.

Pola itu berlanjut hingga Oktober 2022 ketika Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Ruruh A. Setyawibawa berkunjung ke konsesi Harita dengan dalih meninjau obyek vital nasional dan berpartisipasi dalam kegiatan seremonial perusahaan.

Koneksi Harita dengan pejabat lokal, pasukan keamanan, dan elite politik nasional itu telah melindunginya dari penegakan hukum negara. Dalam lingkungan seperti itu, gagasan uji tuntas perusahaan menghadapi gesekan politik yang signifikan ketika mencoba mendorong perilaku mitra yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Asumsi bahwa standar kepatuhan global mengalir hingga ke pemasok meremehkan jaringan patronase lokal mitra-mitra mereka.

Baca Juga:

- [Jaringan Bahlil dan Keluarga dalam Bisnis Nikel Raja Ampat](#)

Namun ini tidak berarti undang-undang akuntabilitas perusahaan tidak berguna. Gagasan reformasi Konzernverantwortungsinitiative bisa memainkan peran normatif yang penting, antara lain mendorong perusahaan memetakan risiko, meningkatkan pengungkapan, atau menarik diri dari kemitraan yang merugikan. Masalahnya, [akuntabilitas tidak muncul dari instrumen hukum saja, terutama ketika diterapkan dari luar](#).

Dalam konteks Indonesia, di mana lembaga penegak hukum beroperasi dalam jaringan patronase, problem akuntabilitas perusahaan bukan pada kurangnya aturan formal, melainkan pada kurangnya keterbukaan vertikal. Misalnya kemampuan warga negara dan masyarakat menuntut ganti rugi dari mereka yang berkuasa.

Memperkuat akuntabilitas dalam situasi seperti itu memerlukan strategi yang berdasarkan politik: mendukung tindakan hukum, membangun kapasitas pemantauan independen, serta menciptakan ruang bagi masyarakat sipil untuk menantang pelaku korporasi dan pendukung politik mereka. Tanpa dinamika politik lokal yang melindungi perusahaan ekstraktif dari pengawasan, undang-undang uji tuntas yang terkuat sekalipun berisiko menjadi alat performatif—yang dirancang untuk meyakinkan audiens asing ketimbang memberikan keadilan di lapangan. •

Keterangan redaksi:

Artikel ini mengalami penambahan tautan referensi pada Jumat, 20 Juni 2025 pukul 17.00 WIB.

Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan.

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: pendapat@tempo.co.id disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan profil singkat.
